

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Kerangka Penelitian.....	18
F. Hasil Penelitian Terdahulu	27
BAB II LANDASAN TEORI	34
A. Pendekatan Teoritis Tentang Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	34
1. Negara Hukum	34
2. Sistem Peradilan Pidana	38
3. Penegakan Hukum di Indonesia	40
B. Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Indonesia.....	43
C. Perlindungan Hukum Bagi <i>Whistleblower</i> di Indonesia	51
D. Peran Pelapor Tindak Pidana Korupsi (<i>Whistleblower</i>) Dalam Penanggulangan Korupsi.....	55
1. Definisi pelapor tindak pidana korupsi (<i>Whistleblower</i>)	55
2. Prinsip Pelapor Dalam Konteks Hukum Pidana.....	63
3. Fungsi Pelapor dan Pelapor Tindak Pidana Korupsi.....	68
E. Kebijakan Perlindungan bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi.	71
1. Implikasi Hukum bagi Pelapor Korupsi.....	75

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	81
A. Metode Penelitian	81
B. Pendekatan Penelitian.....	81
C. Sumber Data.....	82
D. Pengumpulan Data	83
E. Teknik Analisis Data	83
F. Lokasi Penelitian	85
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI (<i>WHISTLEBLOWER</i>) OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	86
A. Pembahasan	86
1. Kedudukan Lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK	86
2. Pelayanan perlindungan bagi pelaporan tindak pidana	92
3. Mekanisme Perlindungan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	96
a) Tahapan Permohonan dan Proses Verifikasi.....	97
b) Kriteria Penerima Perlindungan	98
c) Waktu dan Cara Proses Permohonan	101
B. Hasil Penelitian	107
1. Pelaksanaan Perlindungan Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.	107
2. Mekanisme perlindungan hukum untuk pelapor tindak pidana korupsi.....	118
a) Perlindungan Pelapor tindak pidana korupsi (<i>Whistleblower</i>) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	120
b) Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Pelapor tindak pidana korupsi (<i>Whistleblower</i>)	124
c) Hambatan Hukum dan Administratif	128

BAB V PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN.....	144